

DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD NATSIR DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Ihya `Ulumuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ihyaul Ulum Gresik, Indonesia

E-mail: ihya_online@gmail.com

Abstract: The article discusses Muhammad Natsir's concept of democracy of Islamic education. Assessing democracy and Islamic education is inevitably important particularly when the modern people deal with such densely complicated problems within their life as they will lose a control upon the values of humanism. Therefore, emphasizing the values of humanity in their appropriate place within educational realm (in this context is Islamic education) is unquestionably pivotal matter. The study finds that democracy of Islamic education in Natsir's perspective can be noticeably observed in his notions on integral, harmonious and universal education. Moreover, the author would argue that Natsir's perspective of democracy within educational sphere has found its significance to the contemporary Indonesia's national educational system. It can be visibly seen, among others, in efforts to inhabit and cultivate the values of democracy, which have been firmly itemized in the Act of National Educational System. In this context, Islamic educational institutions have also take part and put great priority in cultivating such values within their all formal educational levels.

Keywords: Democracy; Islamic education; the national educational system.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar manusia di manapun mereka berada. Selain fungsi utamanya sebagai alat untuk mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah lebih baik atau

ke arah yang mereka cita-citakan,¹ pendidikan juga terbukti ampuh sebagai amunisi pengukuh fitrah kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, dengan kapasitas keilmuaan yang diperoleh manusia melalui pendidikan, Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat. Janji Allah dalam kitab suci-Nya tersebut tentu bukan hanya sekedar iming-iming di dunia, lebih dari itu terkait erat dengan kehidupan akhirat kelak. Lebih dari itu, siklus pendidikan yang melibatkan manusia yang mempunyai peran sebagai subjek dan sekaligus objek pendidikan (*homo educantum*), diharapkan dapat beriringkelindan saat pendidikan diselenggarakan dalam sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Artinya, pendidikan yang dilakukan manusia akan dapat berjalan dengan ideal saat dalam prosesnya juga turut melibatkan semua komponen-komponen pendukung (baca: *stakeholder*).

Bercermin pada apa yang dikemukakan oleh John Dewey, sebagaimana dikutip oleh Samawi, bahwa negara yang berazaskan demokrasi merupakan negara yang dapat menyediakan pemerataan kesempatan pendidikan (*educational equality*) dan pemerataan mutu pendidikan bagi semua warga negaranya secara adil.² Dapat dipahami pula pendidikan dan demokrasi merupakan satu paket, dimana oleh Dewey pendidikan diibaratkan sebuah sarana/lahan bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pendidikan dan demikian juga penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dijauhkan dari sebuah negara (yang demokratis).³

Resiprokalitas pendidikan dan demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Dewey, menyibak perhatian terhadap demokrasi yang oleh sebagian kalangan dipahami hanyakses pada domain politik pemerintahan semata. Lebih dari itu, mengesampingkan salah satunya sama halnya berjalan dengan menggunakan satu kaki alias pincang. Itulah salah satu sebab impian akan adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya dapat

¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 3.

² Ahmad Samawi, dkk., *Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Menurut Progressivisme John Dewey* (Yogyakarta: BPPS-Universitas Gadjah Mada, 1995), 560.

³ Arif Rohman, *Membebaskan Pendidikan: Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 13-14.

diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.⁴

Sejatinya negara memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni dalam bentuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi praktik pendidikan bagi warganya. Namun tidak jarang dalam tataran implementasi, negara justru melakukan politisasi dunia pendidikan dalam rangka melegitimasi dan mempertahankan status-quo. Dinamika pendidikan yang dicerminkan pemerintah yang seharusnya *full presented servicing* kepada masyarakat telah terancuni oleh motif-motif lain, di mana pendidikan dijadikan alat kepentingan kekuasaan. Lambat laun melalui pendidikan, negara menciptakan *falsches bennusstsein* (kesadaran palsu) yang berdampak pada persoalan krusial, yakni keadilan dan pemerataan pendidikan. Ketidakadilan pendidikan menggejala melalui elitisme yang mengarah pada lahirnya kasta akademik dalam pendidikan.⁵ Pendidikan Islam bukanlah termasuk dalam pengecualian dalam fenomena ini, di mana ia juga terkena imbasnya. Maraknya pendidikan yang berbiaya mahal dan penyeragaman atau uniformitas pendidikan jelas telah mencederai prinsip dan nilai demokrasi pendidikan.

Membincang persolan demokrasi dan pendidikan, sejarah mencatat rekam jejak dan sepak terjang salah satu tokoh penting bangsa Indonesia. Dia adalah seorang tokoh pendidik yang sekaligus memiliki kepiawaian dalam dunia perpolitikan, keorganisasian dan dakwah. Tokoh dimaksud adalah Muhammad Natsir. Kapasitas, kapabilitas, dan kontribusinya dalam membangun peradaban bangsa ini tidak diragukan. Natsir memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mencetuskan pemikiran-pemikiran progresif tentang pendidikan Islam di Indonesia. Ide-idenya yang progresif telah memberikan warna tersendiri bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia sebagai langkah besar dalam menyongsong peradaban bangsa ini yang lebih baik dan sejajar dengan peradaban bangsa-bangsa lain.

Sebagai tokoh pendidikan, pandangan-pandangan Natsir memberikan corak dominan bagi bangunan pendidikan keagamaan Islam. Gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan dan ceramah juga telah banyak

⁴ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), 84.

⁵ Rohman, *Membebaskan Pendidikan*, 20.

didokumentasikan, salah satunya adalah *Capita Selecta* jilid 1 dan 2 yang merupakan *manifesto* pandangan umumnya tentang ideologi negara (politik) dan, tentunya, pendidikan Islam.

Orientasi ideologi negara dimaksud, kemudian tergambar dalam gagasannya tentang demokrasi. Dalam pemikiran Natsir, sebagai seorang tokoh politik Islam, ia tidak menolak sepenuhnya sistem demokrasi yang berasal dari Barat. Natsir justru menawarkan pandangannya dengan konsep Theistik Demokrasi, yakni perkawinan antara teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Natsir menolak sistem theokrasi dan sekularisasi, namun ia sependapat dengan gagasan nasionalisme.⁶ Hal ini karena, menurut penulis, gagasan nasionalisme dalam pandangan Natsir sepertinya mengandung konsep Theistik Demokrasi. Artinya, “demokrasi nasionalisme” mengandung keseimbangan.

Sementara itu pandangan Natsir mengenai pendidikan mengarah pada konsep pendidikan Islam yang integral, harmonis dan universal. Natsir menolak dengan tegas sistem pendikotomian pendidikan, terutama pada aspek materi atau kurikulum menjadi pendidikan umum dan agama.⁷ Pasalnya, pendikotomian dalam pendidikan justru akan sulit menghasilkan ilmu/pengetahuan yang sempurna bagi peserta didik. Dikotomi semacam itu hanya akan menghasilkan pengetahuan yang parsial, setengah-setengah, dan menyebabkan adanya pretensi untuk membandingkan antara ilmu agama dan umum di kalangan peserta didik yang justru berdampak negatif bagi perkembangan pemikiran mereka.

Memahami pandangan Natsir mengenai demokrasi dan pendidikan Islam, berarti memahami orisinalitas gagasan pemikir ini mengenai demokrasi pendidikan Islam pada komunitas atau masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini juga berpotensi bagi siapapun yang peduli kepada pendidikan Islam di Indonesia untuk menafsirkan atau setidaknya memberi gambaran lebih utuh mengenai konstruksi ideologi demokrasi pendidikan Islam yang diusung oleh Natsir.

⁶ Pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma shari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang ditetapkan Tuhan. M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Dewan Dakwah, 2000), 68.

⁷ Durhan, “Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir”, dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M. Ridwan Natsir (et al.) (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011), 94.

Gagasan Pokok dalam Terma Demokrasi Pendidikan

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana hubungan demokrasi dan pendidikan dalam perspektif pendidikan itu sendiri? Dalam hal ini, Dede Rosyada memberikan pernyataan bahwa istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat, dengan alam mekanisme demokrasi (politik) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan. Akan tetapi secara substantif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan maupun evaluasi.⁸ Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa semangat demokrasi bisa digunakan dalam ranah pendidikan.

Apabila terma demokrasi digabungsandingkan dengan pendidikan, maka memunculkan pengertian, sebagaimana diungkap Vebrianto, bahwa pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak didik untuk mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.⁹ Di sisi lain, Sugarda Purbakawatja memberikan definisi bahwa demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat (warga belajar) mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil.

Menyimak lebih jauh hubungan demokrasi dan pendidikan, pada keduanya mempunyai hubungan yang saling menunjang. Karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak didik ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak.¹⁰ Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada anak didik dalam keadaan sewajarnya, meliputi aspek intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya.

Demokrasi dalam pendidikan juga dimaknai sebagai pengakuan terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat

⁸ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Jakarta: Kencana, t.th.), 15.

⁹ St. Vebrianto, *Kapita Selekta Pendidikan II* (Yogyakarta: Paramita, 1998), 35.

¹⁰ Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B Mangunwijaya* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 89.

peserta didik itu sendiri, karena demokrasi adalah alami dan manusiawi.¹¹ Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai keragaman kemampuan dan karakteristik individu anak didik serta tidak dibenarkan adanya unsur paksaan¹² dalam proses pendidikan. Selain itu, melaksanakan demokrasi pendidikan berarti melibatkan usaha yang lebih luas untuk memahami perbedaan-perbedaan individual atau kelompok untuk mendapatkan sistem pendidikan dan kecakapan dalam memilih sesuai dengan kepribadian anak didik sendiri.

Membaca demokrasi pendidikan, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, demokrasi secara horizontal, yakni bahwa setiap anak didik harus mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan (sekolah). *Kedua*, demokrasi secara vertikal, bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹³ Dalam konteks pelaksanaan, menurut Hasbullah,¹⁴ proses demokrasi pendidikan lazimnya akan berlangsung antara pendidik dengan anak didik dalam pergaulan, baik secara perorangan maupun kolektif, dan bisa dalam bentuk tatap muka hingga pemanfaatan media cetak atau elektronik. Dengan demikian, demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan.

Realitas Sosial Pendidikan Islam Muhammad Natsir

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, masa penjajahan merupakan tamparan keras bagi keberlangsungan pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Semenjak diberlakukannya sistem pendidikan imperialis, ruang gerak dan eksistensi ulama dan pesantren selaku lembaga pencerdas bangsa (saat itu) dilumpuhkan perlahan secara sistemik dan sistematis melalui permainan pendirian sekolah-sekolah kolonial. Padahal, sejatinya pendidikan kejuangan di pesantren melahirkan kekuatan Islam yang integratif. Menurut Sartono, ajaran

¹¹ Iskandar Wiryo Kusuma, "Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Pengalaman Empirik", *Makalah* (Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Malang, 7 Oktober 2001), 2.

¹² Ibid.

¹³ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 241.

¹⁴ Ibid., 244-245.

pesantren telah meniadakan rasa etnoregional dan menjadikan Islam sebagai simbol gerakan nasional.¹⁵ Artinya, lembaga pendidikan pesantren mengubah jiwa sukuisme atau rasisme masyarakat menjadi semangat nasionalisme. Lebih dari itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah menunjukkan kontribusinya bukan hanya dalam arti sempit, melainkan juga berperan serta dalam membangun *character* dan *national building*.¹⁶

Sementara itu “permainan” dalam ranah pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial bukan untuk mencerdaskan anak bangsa atau pribumi, melainkan upaya penjajah agar pribumi Muslim tetap terbelakang dan terbelenggu dalam rasa rendah diri. Sebagai landasan dasar pelaksanaan sistem pendidikan yang mereka jalankan, mereka berpegang pada prinsip diskriminasi. Tentu tidak lain sistem pendidikan model demikian hanya dijadikan sebagai media penciptaan stratifikasi sosial yang feodal.¹⁷ Sistem pendidikan imperialis inilah yang menjadi tonggak awal munculnya model dualisme pendidikan di Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pendidikan barat (umum) dan pendidikan timur (Islam/agama).

Praktik hegemoni yang dilancarkan kolonial melalui kebijakan politik pendidikan tetap berlangsung hingga era kemerdekaan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila corak dominan pendidikan saat itu terbelah menjadi dua *mainstream*, yaitu: *pertama*, pendidikan agama yang direpresentasikan dengan keberadaan pesantren, surau dan masjid dengan fokus pada pengajaran agama dan akhlak. Menurut Ajip Rosidi, model pendidikan tersebut kurang memperhatikan pengajaran ilmu-ilmu umum yang sejatinya sangat penting bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia, sehingga lulusan dari pendidikan agama akan tertinggal dan sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan zaman.¹⁸ *Kedua*, pemerintah berkecenderungan pada pendidikan umum yang domain muatan ajarnya lebih pada ilmu-ilmu umum atau keduniawian dan memomorduakan pendidikan agama dan akhlak. Dualisme pendidikan semacam ini tentu

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya (Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 222-223.

¹⁶ Ahmad Mansur Surya Negara, *Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2012), 307.

¹⁷ *Ibid.*, 308.

¹⁸ Ajip Rosidi dalam M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Girimukti Pusaka, 1988), xix.

tidak ideal dalam pandangan Islam. Hal ini karena Islam merupakan agama yang universal (*ka'ffah*) yang memberikan pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan *fi al-dunyâ wa al-âkhirah*.

Melihat realitas ketimpangan pendidikan Islam sebagaimana di atas telah menggerakkan Natsir untuk memikirkan sebuah konsep pendidikan utuh dan kembali ke fitrahnya. Menurutnya, pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.¹⁹ Natsir menambahkan bahwa dunia dan akhirat bukanlah dua barang yang bertentangan yang harus dipisahkan, melainkan keduanya adalah serangkai yang harus saling melengkapi dan lebur menjadi satu susunan harmonis dan seimbang untuk mencapai kebahagiaan dalam bingkai penghambaan diri kepada Allah. Sebagai konsekuensinya perlu integrasi sekolah umum dengan madrasah (pesantren atau pendidikan Islam).²⁰

Terkait dengan sistem pendidikan yang datang dari barat maupun timur, Natsir tidak mempersoalkannya. Dia justru mempertegas kedudukan antara persoalan yang termasuk *haqq* dan yang *bâtil*. Meskipun demikian, harus digarisbawahi bahwa penolakan Natsir terhadap sekularisme sangat tegas dan jelas dengan pengistilahan yang ia nyatakan bahwa sekularisme ialah “netral agama” (*lâ dînîyah*), dan hal ini termasuk pada ranah kebatilan sehingga tidak perlu untuk dipertahankan apalagi diikuti.

Keseriusan Natsir mengenai gagasannya untuk menanggulangi krisis pendidikan saat itu, ia buktikan ketika menduduki posisi Perdana Menteri dengan memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bahder Djohan, agar memasukkan materi atau pelajaran agama (Islam) di sekolah-sekolah umum. Instruksi yang sama juga berlaku kepada Menteri Agama, KH. A. Wahid Hasyim, agar memasukkan materi umum untuk diajarkan di sekolah-sekolah agama (baca: madrasah dan pesantren).²¹

¹⁹ M. Natsir, *Capita Selecta I* (Bandung: Sumup, 1961), 57.

²⁰ Ramayulis, *Model Pendidikan Islam Era Modernisasi* (Padang: t.p., 1995), 67.

²¹ Agus Basri, “Pahlawan NKRI yang Terlupakan”, dalam *100 Tahun Mohamad Natsir: Berdamai dengan Sejarah* (Jakarta: Republikan, 2008), 156.

Ide Pendidikan Integral Muhammad Natsir

Muhammad Natsir adalah sosok di balik peletakan dasar sistem pendidikan integral di saat pendidikan Indonesia pada awal 1930-an masih terkotak-kotak ke dalam pendidikan sekular di satu sisi dan pendidikan agama di sisi lain. Dua pembelahan model pendidikan tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak pernah bertemu. Sistem pendidikan demikian sengaja dikembangkan oleh kolonial di wilayah jajahannya sebagaimana yang diterapkan di negeri asalnya yang berpegang pada prinsip *separation of church and state* dalam bingkai sekularisme.

Secara prinsip, pendidikan integral dalam gagasan Natsir ialah penyatuan problem dualisme pendidikan saat itu, yakni dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pendidikan agama dan pendidikan umum oleh Natsir dipandang sebagai kesatuan dan merupakan satu kesinambungan yang tidak patut dipisahkan. Gagasan Natsir ini didasarkan pada pandangannya bahwa agama memiliki nilai universal yang fleksibel untuk ditarik pada ranah apapun dan dimanapun, tidak lekang oleh waktu dan tempat. Lebih jauh, agama juga tidak memihak pada disiplin keilmuan tertentu karena keseluruhan ilmu hakikatnya merupakan ajaran agama, sehingga mempelajarinya merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Ide pendidikan integral Natsir tersebut sangat elegan dengan misi meng*counter* dominasi pendidikan parsial. Dalam ide pendidikan integralnya, Natsir mendambakan adanya keseimbangan antara aspek umum dan agama, intelektualitas dan spiritualitas, intelektualitas dan akhlak, sifat rohani dan jasmani.²² Konsep pendidikan integral, harmonis, dan universal tersebut oleh Natsir dihubungkan dengan misi ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal. Menurutnya, Islam bukan hanya agama dalam pengertian yang sempit yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Harapan besar dengan kehadiran sistem pendidikan integral ialah terbangunnya pendidikan umum yang tidak hanya mengajarkan keilmuan umum semata,²³ melainkan juga menghadirkan dan memberikan

²² Hepi Andi Bastoni, dkk., *Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah* (Jakarta: Mujtama Press, 2008), 54.

²³ Anwar Harjono, *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 151.

pendidikan keilmuan agama. Ilmu pengetahuan semata, betapapun dipuja, ternyata ia tidak dapat menyelamatkan manusia karena ketiadaan tempat bergantung yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara yang intelektual dan yang spiritual, antara jasmani dan rohani. Itulah yang ditawarkan dalam Islam, dan itu pula yang menjadi landasan sistem pendidikan Islam. Hal yang sama berlaku pada pendidikan agama yang memberikan porsi keilmuaan umum dalam proses pendidikannya. Dengan demikian, dari kedua model pendidikan (pendidikan agama dan pendidikan umum) akan tercipta keterpaduan yang menjadi sebuah pendidikan khas Indonesia.

Sebagai landasan utama pendidikan integral, Natsir mendasarinya dengan nilai tauhid. Tauhid, bagi Natsir, harus menjadi dasar berpijak setiap Muslim dalam melakukan segala kegiatannya, tidak terkecuali pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan tauhid harus diberikan kepada anak sedini mungkin, sebelum tercampuri oleh ilmu-ilmu dan ideologi lainnya. Penekanan unsur tauhid dalam pendidikan perspektif Natsir ditegaskan dalam salah satu tulisannya, *Tauhid sebagai Dasar Didikan*.²⁴ Dalam tulisannya itu, Natsir menceritakan tentang pentingnya penanaman nilai tauhid dengan mengambil contoh seorang profesor fisika bernama Paul Ehrenfest yang mati bunuh diri setelah ia membunuh anak satu-satunya yang teramat disayanginya hanya karena kehilangan tempat bergantung (pekerjaan). Ironi yang tergambar dalam eksemplar tersebut menegaskan pentingnya tauhid sebagai landasan hidup manusia.

Pesan yang disampaikan Natsir menandakan bahwa tauhid merupakan dasar pendidikan yang beriringkelindan dengan ahlak mulia. Pengejawantahan nilai tauhid sedikitnya terproyeksi pada kepribadian yang mulia seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional²⁵ saat ini. Natsir menambahkan bahwa tauhid ibarat dua sisi mata uang yang meskipun tidak akan bisa bertemu tapi keduanya saling melengkapi.

²⁴ Natsir, *Capita Selecta I*, 155.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sisi pertama tauhid dimaknai sebagai elemen pokok untuk memperkokoh kesadaran batin, menumbuhkan spritualitas dan sebagai pijakan dalam beretika. Sedangkan sisi lain tauhid ditekankan pada pemaknaan pesan kesatuan universal umat, berdasar persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran.

Unsur tauhid yang dijadikan landasan ide integrasi pendidikan perspektif Natsir secara ideal akan melahirkan integrasi pendidikan agama dan umum dengan tanpa menyisakan masalah serta dapat berjalan seimbang. Dalam konteks ini, keseimbangan yang diharapkan, antara lain, adalah²⁶ keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara badan dan roh, keseimbangan antara individu dan masyarakat, dan sebagainya.

Menghilangkan unsur tauhid dalam pendidikan, menurut Natsir, merupakan kesalahan fatal dan berbahaya. Keilmuan apapun yang diperoleh selama masih menihilkan dasar ketuhanan (ketauhidan), maka hal itu tidak berarti apapun dan hakikatnya adalah kosong. Natsir mengkritik para intelektual Muslim yang justru menentang Islam. Hal ini ditandai dengan kemunculan kelompok *western-minded*²⁷ yang tidak lain merupakan produk dari proses pendidikan yang menegasikan unsur agama (tauhid). Inilah satu hal yang membuat Natsir menilai pentingnya tauhid sebagai dasar bagi pendidikan, terutama pendidikan Islam.²⁸ Sampai di sini, ide pendidikan integral yang ditawarkan Natsir berusaha untuk menghadirkan pendidikan yang mengakomodir semua keilmuan,

²⁶ Natsir, *Capita Selecta I*, 155.

²⁷ Muhammad Natsir menghadirkan satu tokoh muda yang terpengaruh oleh *western-minded* seperti yang dikutip oleh Abuddin Nata: “Salah satu usaha pemerintah kolonial Belanda yang juga merupakan tantangan adalah apa yang dikenal dengan asimilasi atau se-Indonesiasi, yaitu upaya untuk mengajak golongan elite Indonesia agar merasa dan menganggap sebagai orang Belanda yang sama-sama berkiblat ke Den Haag, sehingga terlepas dari pandangan hidupnya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya asli Indonesia. Murid-murid sekolah yang otaknya brilian dititipkan kepada keluarga Belanda atau keluarga yang beragama Kristen. Salah satu korbannya adalah Amir Syarifuddin yang lahir sebagai anak Islam, namun kemudian menjadi seorang Kristen Protestan”. Abuddin Nata, *Tokoh Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82.

²⁸ Badru Tamam, *Konsep Pendidikan Mohammad Natsir*. <http://www.voaislam.com/teenage/print/2009/07/09/187/konsep-pendidikan-mohammad-natsir/> (8 Mei 2014).

baik agama maupun non-agama, serta ingin tetap konsisten memegang nilai-nilai tauhid²⁹ sebagai landasan berpijak.

Sebagai langkah konkret atas ide pendidikan integralnya, Natsir merintis lembaga Pendidikan Islam, yang kemudian dikenal dengan Pendis, pada 1932. Kehadiran Pendis sebagai lembaga pendidikan menjadi model alternatif sekaligus sebagai jawaban atas problem sistem pendidikan kolonial saat itu. Pada mulanya Pendis hanya memiliki tujuh anak didik dan seiring waktu ia meluas ke kota-kota lain di Jawa Barat. Pola pendidikan di Pendis menghadirkan sentuhan pendidikan Islam dan tidak tertinggal memanfaatkan nilai pendidikan kolonial yang masih relevan digunakan. Pendidikan integral yang ditawarkan di Pendis diterima banyak pihak dan telah menjadi basis pendidikan di seantero Indonesia hingga saat ini. Sehingga, secara tidak langsung, konsep integrasi pendidikan dengan kehadiran Pendisnya Natsir menganulir *mainstream* sistem dikotomi pendidikan. Di sisi lain, Pendis juga mempertegas bahwa tidak ada lagi perbedaan dan pemisahan antara sekolah umum dan sekolah agama, madrasah atau pesantren.³⁰

Berlandaskan semangat penolakan terhadap sekularisme, ide pendidikan integral Natsir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hussein Umar,³¹ terus mengalir dan hadir hingga saat ini dalam bentuk berdirinya sekolah-sekolah tinggi Islam, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Universitas Islam Riau (UIR) Riau, Universitas Al Alzhar Indonesia, dan Lembaga Pendidikan Da'wah Islam (LPDI) Jakarta yang kini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Muhammad Natsir.

²⁹ Berkaitan dengan urgensi tauhid sebagai dasar pendidikan, Muhammad Natsir bersama 53 orang pimpinan dan tokoh masyarakat mengajukan tuntutan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar meninjau kembali buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Menurut Natsir dan kawan-kawannya, sebagian dari isi buku tersebut mengarah kepada pendangkalan aqidah, penyamarataan semua agama dan mempertentangkan Pancasila dan agama. Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan*, 86.

³⁰ Mochtar Naim, "Mohammad Natsir dengan Konsep Integral dan Toleransinya", dalam *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah* (Jakarta: Republikan, 2008), 210-211.

³¹ Ia adalah tokoh yang mewarisi sebagian sikap dan pemikiran Muhammad Natsir.

Gagasan Demokrasi Pendidikan Muhammad Natsir

Sebagai pemikir dan seorang penggerak yang aktif sebagai birokrat, politisi, dan cendekiawan,³² Natsir tentu memiliki pemikiran atau pandangan tentang demokrasi. Sebab, pemikiran yang lahir dari seorang tokoh merupakan refleksi atas kondisi demokrasi yang dialami dalam realitas dan konstelasi politik berdasarkan modal teoretis demokrasi yang ia miliki.

Demokrasi³³ pada dasarnya adalah mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda antara satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual. Selain itu, demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut Natsir demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan paham demokrasi yang di dalamnya mengandung unsur kedaulatan rakyat.³⁴ Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Sampai tahap ini Natsir menerima ide demokrasi, namun ia lebih sepakat demokrasi tersebut dibalut dengan nilai-nilai shari'ah Islam. Sebab, menurut Natsir, dalam Islam sendiri banyak ditemukan prinsip-prinsip yang sejalan (*compatible*) dengan demokrasi.

Kritik Natsir terhadap paham demokrasi ialah tentang sistem kedaulatan rakyat, yang mana dipahami bahwa kekuasaan rakyat merupakan sesuatu yang mutlak dan sebagai pemegang kuasa tertinggi. Rakyat (dalam hal ini diwakili oleh majelis perwakilan) berwenang

³² Harjono, *Pemikiran dan Perjuangan*, 222.

³³ Istilah demokrasi pertama kali muncul di Yunani sekitar 2,5 ribu tahun silam, di salah satu kota Yunani, Athena. Namun, bukan berarti substansi demokrasi tidak dapat ditemukan sebelumnya. Franz Magnis-Suseno melihat bahwa jauh sebelum munculnya Yunani, yakni empat ribu tahun silam di mana muncul Abraham (Ibrahim) di masyarakat Israel telah menemukan akar-akar demokrasi. Lihat M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), "Agama dan Dialog antar Peradaban", dalam *Demokrasi: Tantangan Universal* (Jakarta: Paramadina, 1996), 129-130.

³⁴ Dalam pengertian yang partisipatif demokrasi disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

sepenuhnya membuat undang-undang. Segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh majelis menjadi suatu ketentuan yang harus dijalankan.

Natsir melihat demokrasi dalam konteks ini sebagai sesuatu yang kontraproduktif; tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, kekuasaan rakyat tidaklah bersifat mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan shari'ah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pernyataannya: "Demokrasi Islam itu adalah suatu pengertian dan paham yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Islam bukan demokrasi 100% (baca: sepenuhnya), bukan pula teokrasi 100%. Islam (itu), ya Islam."³⁵

Pernyataan Natsir di atas mengandung kata-kata kunci yang merupakan asumsi dasar pemikirannya tentang demokrasi. Asumsi ini berangkat dari penolakan Natsir atas hegemoni "konflik teoritis" demokrasi oleh Barat yang cenderung dipaksakan dalam tubuh pemerintahan saat itu. Dalam kaitan inilah mengemuka pemikiran demokrasi Natsir dengan istilah *theistic democracy*, sebagaimana disebut di atas.³⁶ Ide Natsir tentang *theistic democracy* dilatari oleh pandangannya tentang Islam, yaitu: *pertama*, Islam tidak mengenal konsep demokrasi yang berkembang di Barat, dalam arti semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak mayoritas anggota parlemen, sedangkan dalam Islam tidak semua persoalan harus dibicarakan dan diputuskan di dalam dan oleh parlemen. Persoalan yang akan diputuskan hanya berkaitan dengan persoalan yang tidak ditemukan secara tegas penjelasannya dalam *nasy*.

Kedua, Islam tidak mengenal sistem teokrasi di mana suatu pemerintahan dikuasai hanya oleh satu *priesthood* (sistem kependetaan), yang mempunyai hierarki serta menganggap penguasa itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itulah Natsir menawarkan konsep "demokrasi Islam", yaitu dengan mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Secara tegas Natsir tidak sepakat dengan sistem teokrasi dan sekularisasi, justru dalam ide demokrasinya ia mengidealkan tumbuhnya nasionalisme, yang salah satunya dapat berwujud melalui perhatian negara pada domain pendidikan.

Titik kait dengan pendidikan—melalui *theistic democracy*-nya—Natsir mengamini bahwa semua umat manusia mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Tidak hanya

³⁵ M. Natsir, *Demokrasi di Bawah Hukum* (Jakarta: Media Dakwah, 1973), 452.

³⁶ Ibid.

orang kaya atau anak orang kaya yang hanya boleh mengenyam pendidikan, tapi pendidikan itu tidak mengenal siapapun. Terlepas apakah mereka keturunan orang tidak mampu, kelompok terbuang, kelompok minoritas, berbeda ras, warna kulit dan suku, semuanya berhak mendapat jatah untuk memperoleh pendidikan.³⁷ Pendidikan tidak membeda-bedakan umat, tidak pula membeda-bedakan kelompok ataupun agama karena pada intinya sikap atau kebijakan yang mengarah pada pembedaan dan diskriminasi merupakan salah satu bentuk pencideraan demokrasi pendidikan yang bertentangan dengan *theistic democracy* itu sendiri. Semua umat mempunyai hak untuk maju, mempunyai kesempatan mengembangkan wawasan intelektual dan mempunyai kesempatan untuk mengasah kemampuan intelektualnya masing-masing.

Melihat posisi demokrasi dan pendidikan, sebagaimana sikap Natsir, sejatinya keduanya saling berkaitan satu dengan lain dan mempunyai hubungan resiprokal yang kuat. Demokrasi dalam ranah pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik tersebut, sebab demokrasi adalah alami dan manusiawi.³⁸ Demokrasi dalam pendidikan menekankan *equal opportunity for all*. Dengan kata lain, setiap peserta didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan.

Satu pemisalan terkait pendidikan dan demokrasi dimaksud ialah saat pendidikan dimaknai sebagai suatu proses untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan harus dilaksanakan dengan menghadirkan suasana belajar yang kondusif dan mampu menumbuhkan potensi peserta didik secara optimal untuk tujuan tertentu³⁹ dengan tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan. Sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi (hak-hak asasi, kebebasan, keadilan, persamaan dan keterbukaan) dapat dipahami dan dimiliki peserta didik, maka perlu adanya pendidikan.⁴⁰ Pada tahap ini pendidikan secara tidak langsung juga berfungsi untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik (saat ini dikenal pula istilah pendidikan demokrasi / pendidikan tentang demokrasi).

³⁷ Durhan, "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", 92.

³⁸ Kusuma, "Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran", 2.

³⁹ Suhardjono, *Haruskah Demokratisasi Belajar Menggunakan Konstruktivistik* (Malang: IPTP, 2000), 4.

⁴⁰ Kusuma, "Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran", 2.

Akhirnya, dalam proses demokrasi pendidikan semua pihak yang terkait sebagai warga belajar (pendidikan) terkonstruksi dalam atmosfer yang bernuansa saling menghargai, baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan antara guru dan siswa dengan semua *stakeholder* terkait, terutama masyarakat termasuk orang tua siswa. Ini berarti bahwa semangat demokrasi pendidikan meniscayakan adanya ketaatan kepada keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Dengan kata lain, seseorang menerima keputusan bersama dengan rasa legawa karena mengesampingkan kepentingan pribadi disertai dengan ketaatan pada tuntutan kesejahteraan umum.⁴¹

Kontekstualisasi Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Harapan bagi terciptanya pendidikan berkualitas meniscayakan berlangsung dalam alam demokrasi pendidikan. Sementara pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Akan tetapi realitas kehidupan yang demokratis nampaknya masih sebatas keinginan daripada kenyataan.⁴²

Melalui demokrasi pendidikanlah, kesetaraan antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar-mengajar dapat berlangsung. Sebab itu, dalam proses pendidikan perlu dikembangkan sebuah pola komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik, sehingga akan menciptakan interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggungjawab. Peserta didik akan tertantang menguji pikirannya dengan argumentasi-argumentasi rasional dan, jika mungkin, berdasar hasil penelitian dan referensi yang kuat.

Kerangka sebuah sistem pendidikan demokratis dalam hal ini berkaitan erat dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan. Langkah teknisnya bisa dimulai, antara lain, dengan mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen, seperti kurikulum, materi pendidikan, sarana prasarana (sarpras), lingkungan siswa, guru dan tenaga kependidikan, dan proses pendidikan itu sendiri. Meski demikian bisa juga dimulai dengan hal yang bersifat khusus yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem

⁴¹ I Nyoman Sudana Degeng, "Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Demokratisasi Belajar", *Makalah*, (Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Malang, 2001), 5.

⁴² Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran*, 84.

pendidikan tersebut seperti bagaimana kurikulum atau proses kegiatan belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga terbentuk nilai-nilai demokratis.⁴³

Kecenderungan terhadap demokrasi mensyaratkan kesiapan pendidikan Islam tatkala ingin menempatkan pendidikan Islam sebagai agen pembangunan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman. Untuk itu pendidikan Islam dituntut harus menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, mampu menerima serta mampu menyesuaikan arus perubahan yang terjadi dalam lingkup atau lingkungan⁴⁴ yang mengitarinya. Secara khusus, proyeksi dari nilai-nilai seperti *equality* (hak bagi semua penduduk), *freedom* (kemerdekaan) yang meliputi kebebasan pers, berkumpul dan berdemonstrasi, serta kebebasan bertindak, *justice* (keadilan),⁴⁵ dan lebih dari itu adalah demokrasi sendiri yang berciri pokok *sovereignty* (kedaulatan rakyat), *consensus* (musyawarah mufakat), serta *accountability* (pemikulan tanggungjawab atas pikiran dan perbuatannya sendiri) penting untuk ditegaskan.⁴⁶ Dalam konteks Islam, baik secara normatif maupun empiris, tidak dijumpai bahwa Islam adalah anti demokrasi.⁴⁷ Dalam diskursus Islam dijumpai sejumlah kaidah yang bahkan selaras dengan konsepsi demokrasi, seperti kaidah *ta'aruf* (saling mengenal)⁴⁸ yang semakna dengan penegasan dalam demokrasi tentang interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal. Dalam kaidah tersebut dapat pula ditangkap makna berupa pengakuan adanya perbedaan dan pluralitas etnis dan bangsa. Jadi, pluralitas dipandang sebagai kenyataan objektif di dunia, tetapi di atasnya terdapat sendi dasar yang asasi, yaitu bahwa nilai manusia—sebagai makhluk—adalah sama di hadapan Tuhan.

⁴³ Arif S. Sadiman, *Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan* (Malang: t.p., 2001), 1.

⁴⁴ Yusuf Amir Feisal, *Re-orientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 131.

⁴⁵ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SI Press, 1994), 32.

⁴⁶ Emil Salim, "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994), 156.

⁴⁷ Jalaluddin Rahmat, "Islam dan Demokrasi", dalam *Agama dan Demokrasi* (Jakarta: P3M, 1994), 156.

⁴⁸ Kaidah *ta'aruf* (saling mengenal) diperintahkan dalam Q.S. al-Hujurât ayat 13.

Kedua, kaidah *shûrâ* (musyawarah). Dalam kaitannya dengan demokrasi, *shûrâ* merupakan kata kunci dalam al-Qur'ân. Secara sederhana *shûrâ* diartikan sebagai pengambilan keputusan secara bersama-sama. Hal ini semata untuk menjaga semangat kolektivitas di satu sisi dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan individu di sisi lain. Dengan demikian, semangat yang dimunculkan dalam *shûrâ* berlawanan dengan sikap individualisme dan despotisme yang kerap terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia.

Shûrâ mensyaratkan adanya kebebasan hak berpendapat dan melalui inilah dapat dilihat kebebasan aktualisasi pribadi. Pada dasarnya, shari'ah memberikan hak kepada individu untuk menegaskan apa saja yang disukainya selama hal itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerugian kepada orang lain. Dalam konteks ini, shari'ah mendorong kebebasan berekspresi dalam berbagai cara, *amar ma'râf nahy munkar*, saling menasehati dalam kebaikan, *ijtibâd* dan *shûrâ*.⁴⁹

Dalam peristilahan bahasa Arab, *shûrâ* berasal dari kata *sharâ* yang berarti "menyarikan". Dalam konteks ini adalah "menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu masalah". Penyarian masalah ini berlangsung bersama orang lain, sehingga ia memiliki kekuatan kolektif. Titik temunya dengan demokrasi adalah bahwa *shûrâ* dapat dijadikan sebagai salah satu instrumennya, sebab secara filosofis *shûrâ* akan mampu mengendalikan atau sedikitnya mengurangi sikap-sikap egoisme individu. Melalui *shûrâ* berpotensi terjadi dialog dua arah dalam kerangka saling memberi dan menerima untuk kebaikan.

Nilai-nilai demokrasi seperti tersebut di atas meniscayakan suatu bentuk kontekstualisasi yang dihadirkan sebagai langkah aplikatif. Natsir menegaskan pentingnya aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan, baik dalam level informal maupun formal.

1. Aktualisasi demokrasi dalam pendidikan keluarga

Pendidikan dalam keluarga merupakan bagian penting dalam pendidikan sosial yang berperan dalam merubah anak dari makhluk biologis-individualis menjadi makhluk sosial. Pada usianya yang dini seorang anak bisa menjadi sangat peka dengan sikap kasih sayang dan toleran atau sebaliknya bengis dan kejam. Anak juga sudah bisa memahami perilaku yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan.

⁴⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 25.

Di sinilah didikan orang tua memainkan peranan penting; apakah mereka bersikap kasih sayang kepada anaknya atau sebaliknya.

Di sisi lain, ketaatan anak usia awal juga masih sangat kuat. Anak pada umur pertamanya (5-8 tahun) memiliki ketaatan pada orang tua dan orang dewasa yang sangat kuat. Kemudian ketaatan ini mengendur seiring dengan semakin bertambahnya usia.⁵⁰ Mengacu pada fakta tersebut, maka arahan dan bimbingan orang tua menjadi sangat penting. Untuk hal-hal yang baik, orang tua diperbolehkan bersikap sedikit memaksakan kehendak terhadap anak. Dalam konteks ini, bukan berarti mengurangi kebebasan anak, melainkan perlu dipandang bahwa anak masih merupakan hamparan dan lembaran kosong yang masih awam dengan nilai-nilai kebajikan. Oleh karenanya mereka harus selalu diarahkan dan dibimbing.

Selanjutnya, ketika anak sudah menginjak dewasa, maka sudah banyak pengalaman dan interaksi sosial yang dilaluinya, sehingga pendidikan yang berjenjang maupun referensinya semakin bertambah. Dalam keadaan demikian kebebasan anak seharusnya semakin terbuka. Artinya, orang tua sudah tidak perlu terlalu mendikte anak. Sebagai salah satu langkah tepat dalam konteks ini adalah dengan memberikan anak alternatif serta pilihan yang pada gilirannya anak sendiri yang menentukan.

Natsir sangat menekankan pentingnya pendidikan di ranah keluarga, sebagai wilayah informal bagi penyemaian bibit-bibit kebajikan. Hal ini sebagaimana yang dia uraikan dalam penjelasannya: “Mengurus pendidikan anak-anak, bukan semata *farḍ ‘ayn* bagi tiap-tiap ibu dan bapak yang memiliki anak, akan tetapi adalah *farḍ kifāyah* bagi tiap-tiap anggota dalam masyarakat kita.”⁵¹ Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa Natsir sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam lingkup keluarga. Domain keluarga dalam mendidik anak bahkan dihukumi sebagai *farḍ* oleh Natsir. Ia meyakini bahwa prioritas pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang selain telah diwajibkan oleh Allah juga telah dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Nabi Muhammad.⁵²

⁵⁰ Mustofa Ahmad Turkey, “Perilaku Demokrasi”, *Oase*, 1995, 24.

⁵¹ Natsir, *Capita Selecta I*, 55.

⁵² Ibid.

2. Aktualisasi demokrasi dalam pendidikan sekolah/madrasah

Sebagaimana relasi atau hubungan pendidikan anak dan orang tua dalam pendidikan keluarga, hubungan antara murid dan guru dalam pendidikan sekolah atau madrasah mengandalkan keterlibatan yang seimbang antarfungsi dan peran pendidik dan kebebasan peserta didik. Namun demikian dalam praktiknya bentuk ideal selalu sulit untuk dicapai.

John Dewey, sebagai salah satu tokoh pendidikan dan demokrasi kontemporer, mengutarakan: *The principal object of education was to instill in student the attitudes and habits conducive to the development of their capacity to solve the problem.*⁵³ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tumpuan dasar pendidikan terletak pada peningkatan kualitas individu, sehingga mampu menyelesaikan problem hidupnya. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, peserta didik juga dituntut mampu mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi seperti kerjasama dan penghargaan terhadap orang lain. Terkait dengan hal ini Dewey menambahkan: *Democratic culture requires from its members a capacity to adopt diverse circumstances and to cooperate with...*⁵⁴

Dewey menegaskan bahwa tradisi demokrasi dalam dunia pendidikan model Barat yang sangat menekankan kebebasan murid dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk berkembang, maka yang demikian itu pada dasarnya merupakan pengalaman sejarah yang dialami oleh dunia pendidikan Barat sekaligus sebagai antitesa model pendidikan sebelumnya yang lebih condong menempatkan pendidik pada level sentral sehingga cenderung suprematif sementara peserta didik pada level periperifal sehingga cenderung subordinatif.

Perlu menjadi catatan bahwa, dengan demikian, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan antara sistem pendidikan yang berkembang di Barat dan sistem pendidikan yang berkembang di dunia Islam. Di Barat, dengan tuntutan kebebasan yang berlebihan, posisi pendidik justru menjadi sangat lemah [untuk tidak mengatakan subordinatif], sehingga peran mereka juga menjadi sangat minim bahkan cenderung kurang dihargai dan praktis hanya memenuhi fungsi kognisi (pengajaran) semata.

⁵³ John Dewey dan Carles Frankel, *International Encyclopedia of The Social Scinces* (London: MacMilan Publisher, 1972), 157.

⁵⁴ Ibid.

Sementara itu, dalam Islam peranan pendidik sangat sentral dan menduduki posisi istimewa.

Dalam konsep Islam, ilmu bersumber dari Allah, dan pendidik adalah “media perantara” yang diberi kewenangan untuk tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (aspek kognisi) tapi juga memberi keteladanan yang baik sebagai pendidik (aspek afeksi). Pandangan teosentris ini kemudian melahirkan sikap positif terhadap eksistensi pendidik. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad, yang oleh Ahmad Hasan dijabarkan menjadi tiga hal, yaitu: *pertama*, tinta seorang pendidik lebih berharga daripada darah *shubadâ'* (orang-orang yang mati syahid). *Kedua*, nilai amalan seorang pendidik melebihi nilai amalan ahli ibadah sekalipun. *Ketiga*, posisi seorang pendidik tidak bisa digantikan kecuali oleh orang yang juga berilmu.⁵⁵ Aspek dogmatis inilah yang mengukuhkan tradisi pendidikan Islam, sehingga sosok pendidik, selamanya, menduduki derajat terhormat.⁵⁶

Selaras dengan Natsir, ia mengasosiasikan pendidik sebagai hamba dan pejuang Allah. Untuk misi mengantarkan peserta didik menuju kehidupan hakiki, dalam ungkapannya:

Seorang pendidik ialah seorang yang menghambakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai manusia. Itulah tujuan hidup manusia di atas dunia. Dan itulah tujuan pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita kaum Muslim.⁵⁷

Hal demikian oleh Natsir dipandang sebagai bentuk atau format ideal dari pendidikan Islam.⁵⁸ Hal ini karena di pangkuan para pendidik terletak masa depan generasi Islam. Terkait cara dan metode dalam proses pembelajaran, Natsir tidak mempersoalkan, baik mengadopsi konsep-konsep dari barat maupun timur selama konsep pendidikan tersebut tidak melanggar aturan-aturan Tuhan. Universalitas absolut hanya merupakan kuasa dan milik Tuhan. Artinya, setiap konsep pendidikan yang diterapkan, baik dari Barat maupun Islam, memiliki kelemahan dan sekaligus kelebihan sendiri. Bagi seorang pendidik nilai

⁵⁵ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 165.

⁵⁶ Muhammad Mustofa, “Islam dan Demokrasi Pendidikan”, *Nizamia*, Vol. 6, No. 1 (2003), 67.

⁵⁷ Natsir, *Capita Selecta I*, 58.

⁵⁸ Ibid.

ukur terletak pada *haqq* dan *bâtil*, kebenaran dan keburukan, bukan pada tataran sumbernya dari barat atau timur.⁵⁹

Di tengah kepungan modernisasi dan globalisasi, gagasan Natsir mengenai demokrasi pendidikan Islam masih menemukan relevansinya. Terlebih pada saat ini di mana proses pendidikan secara dinamis harus terus “diinjeksi” dengan inovasi-inovasi, sehingga tidak gagap menghadapi perkembangan zaman serta memiliki arah dan tujuan jelas. Oleh sebab itu, kontekstualisasi dan aktualisasi demokrasi pendidikan Islam diperlukan guna mengonstruksi perkembangan pendidikan Islam agar mampu mengarahkan proses pendidikan kepada arah keberhasilan yang lebih baik dalam mempersiapkan generasi masa depan penerus perjuangan yang berkualitas unggul.

Catatan Akhir

Konsep demokrasi pendidikan Natsir merupakan satu gagasan yang menempatkan kebebasan manusia untuk dapat terlibat dan bersentuhan secara langsung dengan pendidikan tanpa menghilangkan ruh tauhid atau aqidah yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, manusia memiliki ruang gerak untuk dapat memilih sekaligus menentukan prioritas keilmuan yang menjadi keinginan dan harapannya, sehingga atas dasar kebebasan tersebut setiap individu mampu memahami serta mengaplikasikan segala bentuk keilmuannya untuk kehidupan yang lebih baik.

Sebagai langkah kontekstualisasi demokrasi pendidikan Islam yang ia gagas, Natsir mengemukakan dua bentuk tawaran praktis sebagai bentuk implementasi. *Pertama*, aktualisasi demokrasi pendidikan Islam dalam atau melalui pendidikan keluarga, yakni upaya menempatkan keluarga sebagai basis awal upaya dilangsungkannya pendidikan demokrasi. *Kedua*, aktualisasi demokrasi pendidikan Islam dalam atau melalui pendidikan madrasah/sekolah. Langkah kedua ini merupakan bentuk penguatan dari langkah pertama. Pendidik dan anak didik terkondisikan dalam relasi transformatif yang ada di madrasah/sekolah. Relasi transformatif merupakan hubungan yang meniscayakan proses dialog mendalam antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Di madrasah/sekolah tidak dikenal otoritas tunggal pendidik, oleh

⁵⁹ Ibid.

karenanya pendidik harus selalu menghargai individu peserta didik, kebebasan dan ragam kreativitasnya.

Pemikiran Natsir tentang demokrasi pendidikan Islam, dengan demikian, sangat relevan bila dikaitkan dengan situasi kontemporer pendidikan saat ini. Pendidikan Islam memerlukan inovasi atau terobosan baru untuk bisa menjawab tantangan ke depan sebagai upaya perbaikan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional.

Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Basri, Agus. "Pahlawan NKRI yang Terlupakan", dalam *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Republikan, 2008.
- Bastoni, Hapi Andi, dkk. *Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah*. Jakarta: Mujtama Press, 2008.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Degeng, I Nyoman Sudana. "Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Demokratisasi Belajar", *Makalah*. Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Malang, 2001.
- Dewey, John dan Charles Frankel. *International Encyclopedia of The Social Scinces*. London: MacMilan Publisher, 1972.
- Durhan. "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M. Ridwan Natsir (et al.). Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Fahmi, Asma Hasan. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Feisal, Yusuf Amir. *Re-orientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Harjono, Anwar. *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya (Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

- Kusuma, Iskandar Wiryono. "Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Pengalaman Empirik", *Makalah*. Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Malang, 7 Oktober 2001.
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003.
- Mustofa, Muhammad. "Islam dan Demokrasi Pendidikan", *Nizamia*, Vol. 6, No. 1, 2003.
- Naim, Mochtar. "Mohammad Natsir dengan Konsep Integral dan Toleransinya", dalam *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*. Jakarta: Republikan, 2008.
- Nata, Abuddin. *Tokoh Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Natsir, M. *Demokrasi di Bawah Hukum*. Jakarta: Media Dakwah, 1973.
- . *Capita Selecta I*. Bandung: Sumup, 1961.
- . *Islam sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Dewan Dakwah, 2000.
- Negara, Ahmad Mansur Surya. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani, 2012.
- Rahmat, Jalaluddin. "Islam dan Demokrasi", dalam *Agama dan Demokrasi*. Jakarta: P3M, 1994.
- Ramayulis. *Model Pendidikan Islam Era Modernisasi*. Padang: t.p., 1995.
- Rohman, Arif. *Membebaskan Pendidikan: Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Rosidi, Ajjip. Dalam M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Girimukti Pusaka, 1988.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, t.th.
- Sadiman, Arif S. *Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan*. Malang: t.p., 2001.
- Salim, Emil. "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia", dalam *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Samawi, Ahmad dkk. *Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Menurut Progresivisme John Dewey*. Yogyakarta: BPPS-Universitas Gadjah Mada, 1995.
- Suhardjono. *Haruskah Demokratisasi Belajar Menggunakan Konstruktivistik*. Malang: IPTP, 2000.
- Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher (eds.). "Agama dan Dialog antar Peradaban", dalam *Demokrasi: Tantangan Universal*. Jakarta: Paramadina, 1996.

- Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: SI Press, 1994.
- Turkey, Mustofa Ahmad. "Perilaku Demokrasi", *Oase*, 1995.
- Vebrianto, St. *Kapita Selekta Pendidikan II*. Yogyakarta: Paramita, 1998.
- Yunus, Firdaus M. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B Mangunwijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.